

**RUMUSAN ACARA  
RAPAT PEMANGKU KEPENTINGAN  
PROGRAM PERBAIKAN PERIKANAN RAJUNGAN  
DI PERAIRAN KALIMANTAN TIMUR**

Pada hari Rabu, Dua Puluh (20) September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) telah dilaksanakan Rapat Pemangku Kepentingan Program Perbaikan Perikanan Rajungan di Perairan Kalimantan Timur dalam rangka bimbingan teknis pengembangan kapasitas tingkat 1 MSC, pembentukan panel konsultatif, dan diskusi rencana aksi, sebagai tindak lanjut dokumen pra-penilaian MSC Rajungan unit penilaian Jenebora dan Tanjung Jumalai, dengan metode penangkapan bubu dan *gillnet* di perairan Kalimantan Timur, Wilayah Pengelolaan Perikanan 713.

Dengan memperhatikan:

1. Pemaparan dukungan dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tentang perikanan berkelanjutan dan terukur.
2. Pemaparan pendalaman persepsi terkait definisi, dukungan, dan tujuan sertifikasi *Marine Stewardship Council* (MSC) serta Program Perbaikan Perikanan/*Fisheries Improvement Program*.
3. Pemaparan latar belakang, tujuan, dan tugas dari pembentukan panel konsultatif atau kelompok kerja.
4. Pemaparan draft rencana aksi untuk Program Perbaikan Perikanan/*Fisheries Improvement Program*.

Menghasilkan:

1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Perikanan Level 1 yang disampaikan oleh Anthony Alvin, perwakilan MSC Indonesia kepada para pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Disepakatinya struktur dan mekanisme Pengurus Pengelolaan Rajungan Kalimantan Timur.
3. Disepakatinya draft rencana aksi Program Perbaikan Perikanan Rajungan di Perairan Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil rapat pemangku kepentingan ini, disepakati untuk menindaklanjuti:

1. Perilisan Surat Keputusan Pengurus Pengelolaan Rajungan Kalimantan Timur oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Instansi	Bidang	Jabatan
<b>TIM PENGARAH</b>		
DKP Prov. Kaltim	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	
<b>TIM PENGELOLA</b>		
DKP Prov. Kaltim	Kabid Perikanan Tangkap	Ketua
Diskan Kab. PPU	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
DKP Prov. Kaltim	Kabid PRL	Anggota
DKP Prov. Kaltim	Kabid Budidaya dan PDSP	Anggota
DKP Prov. Kaltim	Kasie Pengelolaan Penangkapan Ikan	Anggota
DKP Prov. Kaltim	Kasie Pengendalian Penangkapan Ikan	Anggota
Diskan Kab. PPU	Kabid Perikanan Tangkap	Anggota
Diskan Kab. PPU	Kabid Penguatan Daya Saing Produk	Anggota
BKIPM Balikpapan	Ketua Tim Pengawasan dan Mutu	Anggota
DP3 Kota Balikpapan	Kabid Perikanan	Anggota
Stasiun PSDKP Tarakan	Satwas SDKP Balikpapan	Anggota
BRIN	Bidang Pusat Riset Perikanan	Anggota
UnMul	Fakultas Perikanan (Dosen)	Anggota
Nelayan	1 Jenebora, 1 Tanjung Jumalai	Anggota
Aruna	Sustainability	Anggota

Demikian rumusan masalah, notulen, dan daftar hadir Rapat Pemangku Kepentingan Program Perbaikan Perikanan Rajungan Perairan Kalimantan Timur ini dibuat dan disepakati bersama agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Program Perbaikan Perikanan Rajungan di Perairan Kalimantan Timur.

Balikpapan, 20 September 2023

Kepala DKP Prov. Kalimantan Timur



H. Irhan Hukmaidly, S.Pi, MP  
Pembina Tk. I  
NIP. 197512282000031001

Rumusan acara ini diketahui dan disetujui oleh perwakilan instansi yang hadir:

<p>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur</p>  <p><u>Deddy Utomo</u> Analisis kapal perikanan dan alat tangkap ikan</p>	<p>Aruna</p>  <p><u>Utari Octaviany</u> Chief Sustainability Officer</p>
<p>Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara</p>  <p><u>Mirsal Damanik</u> Kepala Bidang Perikanan Tangkap</p>	<p>BKIPM Kelas I Kota Balikpapan</p>  <p><u>Kadson Batubara</u> Ketua Tim Pengawasan dan Mutu</p>
<p>Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan</p>  <p><u>Mohamad Idrus</u> Analisis Pasar Hasil Perikanan</p>	<p>Satker SDKP Tarakan</p>  <p><u>Kartini Pallea</u> Analisis Hasil Penanganan Pelanggaran</p>
<p>Pusriskan BRIN</p>  <p><u>Duranta Diandria Kembaren</u> Peneliti</p>	<p>Nelayan Jenebora</p>  <p><u>Syamsudin</u></p>
<p>Nelayan Tanjung Jumlai</p>  <p><u>Sahibe</u></p>	<p>Yayasan WWF Indonesia</p>  <p><u>Sukron Alfi Rintiantoto</u> Capture Fisheries Specialist</p>

## NOTULENSI RAPAT

<b>Tanggal/Waktu</b>	20 September 2023/08:00-17:00 WITA
<b>Lokasi</b>	NEO+ Hotel Balikpapan
<b>Agenda</b>	Rapat Pemangku Kepentingan Program Perbaikan Perikanan Rajungan Provinsi Kalimantan Timur
<b>Tujuan</b>	1. Membentuk panel konsultatif atau kelompok kerja 2. Mendiskusikan dan menyepakati rencana aksi

### SESI PERTANYAAN DAN SHARING (TRAINING)

**Jen (DKP Prov Kaltim):**

- MSC untuk international, sedangkan standar pemerintah ada SKP dan HACCP, apa keuntungan dari MSC?

**Anthony (MSC):**

- Sertifikasi MSC untuk meningkatkan permintaan pasar dari luar, yg mendukung perikanan berkelanjutan.

**Idris (DP3 Balikpapan):**

- Banyaknya sertifikasi berdampak pada harga jual yang tinggi, sedangkan kenaikan harga karena sertifikasi dapat mengakibatkan penurunan angka konsumsi ikan warga lokal.

**Idris (DP3 Balikpapan):**

- Komoditas Tuna Indonesia di Maluku sudah dapat MSC, apakah bisa pelaku penangkapan dari Kaltim bisa juga diklaim dijual dengan MSC?

**Anthony (MSC):**

- Bisa dengan syarat yang dipenuhi. Dalam MSC ada perluasan cakupan, bisa meminta kepada auditor untuk melakukan penilaian tambahan atau mengajukan penilaian mandiri.

**Jen (DKP Prov Kaltim):**

- Yang dinilai hanya satu alat tangkap, kenapa tidak semua?

**Anthony (MSC):**

- Sertifikasi alat tangkap tergantung yang mengajukan, contoh kasus rajungan ditangkap dengan gill net atau bubu. Namun yang mengajukan hanya memasukkan alat tangkap bubu dalam sertifikasi, jadi yang disertifikasi nanti bubu.

**SESI PEMBENTUKAN PANEL KONSULTATIF****Paparan WWF: Latar Belakang Pembentukan Panel Konsultatif**

- Aruna telah melakukan pra penilaian dengan komoditas rajungan menggunakan alat tangkap Bubu dan Jaring di Jenebora dan Tanjung Jumalai.
- Presentasi hasil penilaian ; Aruna masih memiliki PR nilai-nilai indikator kinerja <60 yang berwarna merah (Prinsip 1 (4), Prinsip 2 (6), Prinsip 3 (2))
- Perlunya Kolaborasi Program perbaikan perikanan antar stakeholder.
- 14 Juni 2023 Aruna telah melakukan pre-assessment. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut perlu adanya pembentukan panel konsultatif pada kegiatan hari ini tanggal 20 September 2023, yang mengundang para pemangku kebijakan.
- Dari hasil pra penilaian telah dikembangkan Rencana Aksi dari Aruna (terlampir).
- Perlunya Kolaborasi Program perbaikan perikanan.
- FIP merupakan kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu dalam perikanan
- Adanya tugas panel untuk mewujudkan FIP tersebut (terlampir).

**Pertanyaan dan Pendapat Peserta Rapat****Pertanyaan dan jawaban**

- 1. Dasar hukum terbitnya flow Harvest Strategy (HS)? - Utari, Aruna**
  - Flow HS, diawali berdasarkan kajian data stok perikanan (Alfi, WWF)
- 2. Untuk pemenuhan HS, apakah bisa hanya cukup dengan Permen terkait Rajungan? - Idrus, DP3 Balikpapan**
  - HS adalah turunan dari Rencana Pengelolaan Perikanan, sehingga untuk pengelolaan yang lebih spesifik, HS diperlukan (Duranta, BRIN)
- 3. Kenapa lokasi pengajuan tidak menggunakan Kalimantan Timur? (Kadson, BKIPM I Balikpapan)**
  - Kenapa lokasinya hanya spesifik tidak seluruh kaltim, Aruna memandang dari sisi fokus dulu. Yang dinilai yaitu 2 lokasi. Nanti jika berhasil maka akan dilakukan perluasan wilayah dan duplikasi di wilayah berikutnya, karena jika berhasil berarti seluruh kaltim sudah *eligible*

**4. Perlu diketahui apakah kabid budidaya masih relate dengan program ini. (Alfi, WWF)**

- Kabid Budidaya PPU lingkup perairannya perairan darat, tidak ada budidaya laut, jadi kurang relate. Sebaiknya belum perlu dilibatkan di tim pokja. (Idrus, BKIPM I Balikpapan)

**5. Aruna sempat melakukan restocking bibit-bibit rajungan (APRI juga melakukan hal tersebut). Selain itu, Indonesia memiliki Balai Budidaya 2, Jepara dan Galesong. Masih menjadi pertanyaan Aruna apakah di masa depan rajungan akan dilakukan pengembalian stok ke laut. (Utari, Aruna)**

- Dalam penilaian MSC, terdapat indikator kinerja tentang *stock rebuilding*. Ke depannya perlu ada tindakan-tindakan untuk pemulihan stok (Alfi, WWF)

**Pendapat**

1. Stasiun PSDKP Tarakan dan juga disertai Satwas SDKP Balikpapan agar menjadi team spesifik yang dapat fokus terkait hal ini. (Kartini, Stasiun SDKP Satwas Balikpapan)
2. Saran dari Aruna, karena asesmen akan banyak di wilayah kaltim, serta mempertimbangkan efektifitas koordinasi. Usulan aruna ketua tetap kepala dinas provinsi sebagai tim pengarah level tertinggi. (Utari, Aruna)
3. Perlu adanya pengesahan dari SK Legalitas Pokja terlebih dahulu, sebelum membahas detail rencana aksi. Serta terkait lokasi penilaian stok rajungan, perlu adanya penilaian lokasi status stok. (Duranta, BRIN).
4. BKIPM telah memiliki 2 eselon, terbagi Mutu dan Karantina. BKIPM baiknya tidak ditulis kepala, hanya instansi saja, karena nanti baiknya program ini langsung terikat dengan tim teknis. (Kadson, BKIPM I Balikpapan).
5. DP3 Balikpapan: Mohamad Idrus
  - Tim pengelola tidak memiliki kewenangan untuk implementasi kerja, tetapi DP3 Balikpapan siap membantu
  - Untuk kebijakan wilayah laut dan pesisir tidak merupakan kewenangan kabupaten/Kota
  - Kabupaten/Kota tidak mau melampaui batas untuk pengajuan usulan kelompok kerja
  - Mengharapkan perlunya Direktur KAPI menjadi tim pengarah
  - Perlu pemaparan secara awal terkait review bahan diskusi rencana aksi kedepannya
  - Lokasi Penilaian status stok rajungan di Perairan Kalimantan Timur
6. Berdasarkan UU No. 23, kewenangan dari Kabupaten/Kota tidak mengelola wilayah laut (Mirsal, Dinas Perikanan PPU)
7. DKP Provinsi Kaltim:

- Provinsi hanya sebagai pengarah (laut 12 mil) tidak memiliki nelayan, karena yg mengelola nelayan adalah Kabupaten
- Tim Pengelola sebaiknya menjadi ketua.
- Lokus di PPU, kabid perikanan tangkap DKP PPU menjadi ketua.
- Untuk lokasi penilaian status stok diharapkan di lokasi perairan balikpapan dan penajam

## HASIL RUMUSAN

Dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dibentuknya Pengurus Pengelolaan Rajungan Kalimantan Timur yang akan diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan struktur sebagai berikut:

Instansi	Bidang	Jabatan
<b>TIM PENGARAH</b>		
DKP Prov. Kaltim	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	
<b>TIM PENGELOLA</b>		
DKP Prov. Kaltim	Kabid Perikanan Tangkap	Ketua
Diskan Kab. PPU	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
DKP Prov. Kaltim	Kabid PRL	Anggota
DKP Prov. Kaltim	Kabid Budidaya dan PDSP	Anggota
DKP Prov. Kaltim	Kasie Pengelolaan Penangkapan Ikan	Anggota
DKP Prov. Kaltim	Kasie Pengendalian Penangkapan Ikan	Anggota
Diskan Kab. PPU	Kabid Perikanan Tangkap	Anggota
Diskan Kab. PPU	Kabid Penguatan Daya Saing Produk	Anggota
BKIPM Balikpapan	Ketua Tim Pengawasan dan Mutu	Anggota
DP3 Kota Balikpapan	Kabid Perikanan	Anggota
Stasiun PSDKP Tarakan	Satwas SDKP Balikpapan	Anggota
BRIN	Bidang Pusat Riset Perikanan	Anggota
UnMul	Fakultas Perikanan (Dosen)	Anggota
Nelayan	1 Jenebora, 1 Tanjung Julai	Anggota
Aruna	Sustainability	Anggota

2. Disepakatinya draft rencana aksi Program Perbaikan Perikanan Rajungan di Perairan Kalimantan Timur, dengan 7 rencana aksi sebagai berikut:
  - 1) Penilaian status stok rajungan *Portunus pelagicus* di perairan Kalimantan Timur
  - 2) Mendukung pengembangan strategi pemanfaatan rajungan
  - 3) Penilaian tangkapan sampingan – menggunakan RBF
  - 4) Pengelolaan hasil perikanan pasca penangkapan – Spesies non-target
  - 5) Melakukan penilaian dampak perikanan terhadap ekosistem dan habitat
  - 6) Membentuk pengurus pengelolaan rajungan di Kalimantan Timur

7) Mengembangkan sistem pemantauan, kepatuhan dan pengawasan sumber daya

Detail kegiatan dalam matriks di bawah ini:



















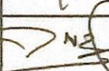





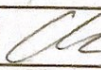

4.3 Pembuatan media informasi	Tersedianya poster dan/atau materi cetak pengelolaan hasil pasca tangkap	4.3.1 Membuat media informasi dan mendistribusikannya ke nelayan	a.Tersedianya poster dan/atau booklet		Poster/booklet																		
4.4 Pengawasan	Tersedianya alat pengawasan dari pengelolaan hasil pasca tangkap (monitoring report)	4.4.1 Membuat monitoring report	a. Tersedianya report dari pengawasan harian/mingguan/bulanan		Monitoring report																		
Action Name/Name of	<b>Aksi 5. Melakukan penilaian dampak perikanan terhadap ekosistem dan habitat</b>					<b>Timeline</b>																	
Action Summary (outcomes)	Aksi ini meliputi kajian dampak alat tangkap terhadap habitat dan ekosistem yang mempengaruhi tumbuh kembang rajungan. Hasil dari kajian dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan perikanan.					2023			2024														
Performance Indicator	2.2.2 Pengelolaan spesies sekunder (<60), 2.3.1 hasil spesies ETP (60-79), 2.3.2 Pengelolaan spesies ETP (<60), 2.5.1 Hasil ekosistem (60-79), 2.5.2 Strategi pengelolaan ekosistem (60-79)					Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt					
Main Activities	Output	Detail Activities	Output	PIC	MoV (need to be checklisted)																		
5.1 Pengambilan data distribusi habitat rajungan	Tersedianya data distribusi habitat rajungan	5.1.1 Pendataan rajungan berdasarkan stratifikasi kedalaman perairan	a. Tersedianya data sebaran rajungan berdasarkan habitat		Dokumen data sebaran rajungan																		
		5.1.2 Analisis data	a. Tersedianya hubungan biomassa dan ukuran rajungan dengan habitat		Dokumen hasil analisis																		
5.2 Monitoring ekosistem	Tersedianya hasil monitoring dampak penangkapan rajungan terhadap lamun dan terumbu karang	5.2.1 Pengukuran tutupan lamun dan terumbu karang	a. Tersedianya data tutupan lamun dan terumbu karang		Dokumen pendataan ekosistem																		
		5.2.2 Analisis data	a. Tersedianya hubungan penangkapan rajungan dengan ekosistem		Dokumen hasil analisis																		
5.3 Sosialisasi hasil kajian	Pemangku kepentingan memahami hasil kajian dampak perikanan terhadap ekosistem dan habitat	5.3.1 Melaksanakan pertemuan pemangku kepentingan dalam rangka sosialisasi hasil kajian	a. Tersedianya TOR pertemuan b. Tersedianya MoM pertemuan c. Tersedianya dokumentasi pertemuan		TOR pertemuan MoM pertemuan Dokumentasi																		
5.4 Menyepakati Kawasan lindung	Tersedianya kawasan lindung berdasarkan sebaran rajungan dan habitat	5.4.1 Membuat peraturan desa tentang kawasan lindung	a. Tersedianya peraturan desa tentang kawasan lindung		Dokumen kawasan lindung																		
Action Name/Name of	<b>Aksi 6. Membentuk pengurus pengelolaan rajungan di Kalimantan Timur</b>					<b>Timeline</b>																	







Hari, tanggal: Rabu, 20 September 2023

No.	Nama Lengkap (Sesuai dengan sertifikat pelatihan)	Instansi	TTD	No. HP
1.	Deddy Utomo, S.Pi	DKP Prov Kaltim		0811588329
2.	M. Ihsan Nugroho	DKP Prov Kaltim		081347166966
3.	JEM M	DKP Prov Kaltim		08125838267
<del>4.</del>	<del>Ir. Andi Trasodiharto, M.Si</del>	<del>Diskan PPU</del>		
5.	Mingsal D	Diskan PPU		082223028460
6.	Muhammad Pexit	Diskan PPU		085348330161
7.	Mohamad Idrus, S.Kel	DP3 Balikpapan		083482012
8.	Kadson Batubara, M.Si	BKIPM Kelas 1 BPN		08215842114
9.	Kartini Pallea, S.St.Pi	Stasiun PSDKP Tarakan		08215711289
10.	Duranta Diandria Kembaren, S.Pi., M.Si	Pusriskan BRIN		08369398237
11.	Sukron Alfi Rintiantoto	WWF Indonesia		
12.	SAHIB E	peralelcepa + dan jurat jal		081324663747
13.	M. ARYAL RAHMAT	Melayan Zenebun		08582143661
14.	SYAMSUDIN	- - -		
15.	Anthony Alvin	MSC		081719956
16.	Fery Mardihastama			08221017965
17.	Utari Octavianthy	Aruna		08518443337
18.	Elkana Lewerisa	Aruna		
19.	Rian Figi Saputra	Aruna		
20.	Anggita Wibowo	Aruna		
21.	Nadya Andriani	Aruna		
22.	Sasta Ardi	Aruna		
23.	Edward Prowanto	Aruna		
24.	Wlfa Andriani	Aruna		
25.	Yasinto	Aruna		





Sambutan oleh Muhammad Idnillah, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, DJPT, KKP



Pengurus Pengelolaan Rajungan Kalimantan Timur



Penyusunan Cara Menilai Perikanan sesuai Standar MSC



Pembentukan panel konsultatif